

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 231 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bojongsoang untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bojongsoang, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bojongsoang untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Bojongsoang untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Bojongsoang;
(2) Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Bojongsoang tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsoang;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Bojongsoang dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Bojongsoang;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Bojongsoang yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Bojongsoang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Bojongsoang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026 disusun dengan sistemika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Bojongsoang tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Bojongsoang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Bojongsoang meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Bojongsoang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Bojongsoang dengan DPRD; dan
d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Bojongsoang.

Pasal 7

(1) Kecamatan Bojongsoang membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Bojongsoang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Bojongsoang tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Bojongsoang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Bojongsoang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Bojongsoang terhadap pelaksanaan dan hasil Kecamatan Bojongsoang.

(3) Camat Bojongsoang menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Bojongsoang.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Bojongsoang dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bojongsoang beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Bojongsoang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Bojongsoang tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 231

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 231 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGSOANG
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana

pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

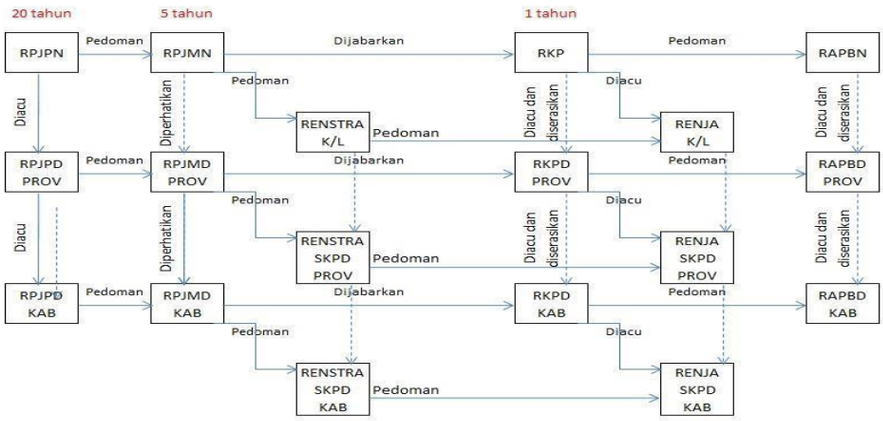
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Bandung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung mencakup :

1. Penyusunan rancangan Keputusan Camat Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahunan;
2. Orientasi mengenai Renja Tahunan;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja tahuanan;

b. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bojongsoang, yang menyangkut aspek :

1) Kondisi pelayanan Kecamatan Bojongsoang;
2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bojongsoang;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang tahun sebelumnya;
4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Bojongsoang;
5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bojongsoang;
7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bojongsoang;
8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;
10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bojongsoang;
12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Bojongsoang;

c. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsoang adalah :

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsoang;
2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD (Indikator Kinerja Program dan Kegiatan);
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari
semua indikator kinerja pada Kecamatan Bojongsoang;

d. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang tahun sebelumnya berdasarkan Renstra

Kecamatan Bojongsoang

Review hasil evaluasi mencakup :

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Bojongsoang;
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojongsoang tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang;
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Bojongsoang dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu

pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya;

e. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan,hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsoang dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsoang;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang;
3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's *(Sustainable Developmnet Goals);*
4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bojongsoang;
6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan;

f. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang.

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bojongsoang.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

g. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang.

h. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran

Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*) tujuan dan sasaran bertujuan untuk menilai kemajuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang.

i. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan

serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Bojongsoang, namun dalam proses ini Kecamatan Bojongsoang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bojongsoang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

j. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsoang dalam pembangunan daerah.

k. Penyajian awal dokumen renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Bojongsoang merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

l. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

m. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah

Penyempurnaan renja Kecamatan Bojongsoang perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

n. Pembahasan forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Bojongsoang dengan saran dan masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

o. Penyesuaian dokumen renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen renja Kecamatan Bojongsoang yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Pendahuluan |1-3 Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025- 2045;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan

Kecamatan Bojongsoang ke dalam rencana kerja tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bojongsoang disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran stategis dan kebijakan Kecamatan Bojongsoang ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongsoang;
2. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;
3. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2026;
5. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing- masing program dan kegiatan Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sitematikapenulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN;	
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN 2024;	
			Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;
BAB II	:		Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan;
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;	
			Berisi tentang telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan program, kegiatan serta sub kegiatan;

BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;	
			Berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu anggaran tahun 2026;
BAB V	:	PENUTUP;	
			Berisi tentag kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2024 terhadap Capaian Renstra Kecamatan Bojongsoang, serta Evaluasi terhadap proyeksi Capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bojongsoang sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bojongsoang berjalan dengan baik. Kecamatan Bojongsoang mengelola anggaran belanja Sebesar Rp. 5. 662, 768,524,00 dengan 6 program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.026.181.491 atau sebesar 88,76 % pada Tahun 2024 atau tahun lalu.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bojongsoang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026 (Sebelum Pemetaan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Sebelum Pemetaan)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025) (Sesudah Pemetaan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Sebelum Pemetaan)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Sebelum Pemetaan)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8 = 7 / 6]	[9]	[10 = 5+7+9]	[11 = 10/4]
7	1	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	73 Poin	68 Poin	73 Poin	75.6 Poin	103.56%	73.00 Poin	73 Poin	100.00%
7	1	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100.00%
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	4 Dokumen	40.00%
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00%

7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	1	Dokumen	2	Dokumen	40.00 %
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	1	Dokumen	2	Dokumen	40.00 %
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00%	1	Dokumen	3	Dokumen	60.00 %
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	3	Laporan	30.00 %
7	1	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									#DIV/0!	1	Dokumen	1	Dokumen	#DIV/0!
7	1	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah									#DIV/0!	56	Laporan	56	Laporan	#DIV/0!

7	1	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	Orang/Bulan	36	Orang/Bulan	18	Orang/Bulan	18	Orang/Bulan	100.00%	17	Orang/Bulan	71	Orang/Bulan	78.89%
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	4	Laporan	80.00%
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	4	Laporan	80.00%
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	1	Dokumen	6	Dokumen	60.00%
7	1	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100	Persen	100	Persen	100.00%
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Jenis	1	Jenis	100.00%	1	Paket	3	Paket	60.00%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100.00%	1	Paket	3	Paket	60.00%

7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100.00%	1	Paket	3	Paket	60.00%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100.00%	1	Paket	3	Paket	60.00%
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	1	Dokumen	12	Tahun	12	Tahun	100.00%	1	Dokumen			
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1.00	Laporan	100.00%	1	Laporan	3	Laporan	60.00%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1.00	Laporan	100.00%	1	Laporan	3	Laporan	60.00%
7	1	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	Persen	100	Persen	n/a
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	n/a	1	n/a	n/a	2	Unit	2	Unit	n/a
7	1	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100	Persen	100	Persen	100.00%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	3	Laporan	60.00%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	3	Laporan	60.00%

						Kantor yang Disediakan									
7	1	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	82 %	80 %	100 %	100 %	100.00%	83.00 Persen	83 Persen	101.22%
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100.00%	7 Unit	21 Unit	60.00 %
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100.00%	3 Unit	8 Unit	80.00 %
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	9 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00%	2 Unit	13 Unit	28.89 %
7	1	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	90 Poin	73 Poin	75 Poin	80 Poin	106.67%	5 Laporan	5 Laporan	5.56%
7	1	2	2.02	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	0 %	0 %	0 %	n/a	100 %	100 %	100.00%
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan	Jumlah Laporan Fasilitasi	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	n/a	1 Laporan	2 Laporan	50.00 %

					Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan									
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	n/a	2 Laporan	2 Laporan	50.00 %
7	1	2	2.03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%		0 0	0.00%
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Laporan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80.00 %
7	1	2	2.04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	11 Laporan	11 Laporan	11.00 %
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00 %
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	3 Laporan	60.00 %

7	1	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	30	orang	30	orang	30.00 %
7	1	4	2.01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum'	100	%	0	%	0	%	0	%	n/a	33	Orang	33	Orang	33.00 %
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	2	Laporan	3	Laporan	37.50 %
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah aporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat	4	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	3	Laporan	75.00 %
7	1	4	2.02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%			0		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	1	Laporan	1.00	Laporan	1	Laporan	100.00%	1.00	Laporan	3	Laporan	75.00 %
7	1	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase capaian keberhasilan urusan	100.00	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%

					PEMERINTAHAN UMUM	pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah											
7	1	5	2.01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	100	%	100	%	100	100.00%	100	%	100.00%
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	120	Orang	0	Orang	30	Orang	30	Orang	100.00%	30	Orang	60	Orang	50.00%
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	250	Orang	25	Orang	50	Orang	50	Orang	100.00%	50	Orang	125	Orang	50.00%
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	1	Dokumen	2	Dokumen	50.00%
7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100	%	100	%	100	%	100	100.00%	100	%	100.00%
7	1	3	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%	100	%	100	%	100	100.00%	11	Lembaga Kemasyarakatan	11	Lembaga Kemasyarakatan	11.00%

7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	Lembaga Kemasyarakatan	0	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	n/a	2	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	50.00 %
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	1	Dokumen	3	Dokumen	60.00 %
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	3	Laporan	60.00 %
7	1	3	2.03	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	19	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	2	Lembaga Kemasyarakatan	9	Lembaga Kemasyarakatan	47.37 %
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	Laporan	1	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100.00%	1	Laporan	5	Laporan	100.00%
7	1	3	2.03	5	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	3	Laporan	75.00 %

						Teknologi Tepat Guna									
7	1	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	11 Dokumen	11 Dokumen	11.00 %
7	1	6	2.01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	0 Laporan	0 Laporan	0.00%
7	1	6	2.01	**2**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00 %
7	1	6	2.01	**3**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00 %
7	1	6	2.01	**9**	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50.00 %

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung berupa :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb :

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
   h. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
   i. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   j. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
   b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ;
   c. Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat; dan
   d. Fasilitasi dan tata pemerintahan desa; dan
   e. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung

Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *Job Performnce* dari suatu organisai yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai

melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung.

Jenis Pelayanan yang ada di Kecamatan Bojongsoang dan Pengelola Layanan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Rekomendasi KK dan KTP

   Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bojongsoang;

2. Layanan Rekomendasi BBM

   Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umu Kecamatan Bojongsoang;

3. Layanan Dispensasi Nikah

   Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bojongsoang;

4. Layanan Surat Pindah

   Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung;

5. Layanan Izin Tempat Usaha

   Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bojongsoang;

6. Jenis Layanan Kepegawaian

   Pengelola Layanannya adalah Sekretaris Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2024 bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsoang

Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Nilai AKIP			66,50	72,00	73,00	74,00	71,05	n/a	73,00	74,00	
2	Persentase BMD dalam kondisi baik			80,00	83,00	82,00	85,00	80,00	n/a	82,00	85,00	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			80,00	83,00	85,00	88,00	91,18	n/a	85,00	88,00	
4	Persentase Desa yang Beradministrasi baik			6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	n/a	6 Desa	6 Desa	

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi} - \text{Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
   Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

   Jumlah Layanan yang ada di Kecamatan Bojongsoang sebanyak 36 Jenis Layanan dengan Skors

/ Nilai sebesar 91,05, Berdasrkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi eskm Kabupaten Bandung dengan tautan https://skm.bandungkab.go.id/storage/file/pdf/Monitoring1752468052.pdf

Realisasi kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik di kecamatan Bojongsoang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai AKIP}}{\text{Target Nilai AKIP}} \times 100\ \% = \frac{72}{75{,}50} \times 100\ \% = 95{,}364\ \%$$

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kecamatan Bojongsoang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Desa}}{\text{Jumlah Desa yang dibina}} \times 100\% \quad \frac{6\ \text{Desa}}{6\ \text{Desa}} \times 100\ \% = 100,\ \%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya Kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.

2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa
   Indikator Kinerja :

   Persentase Desa yang dibina dan diawasi

   Jumlah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bojongsoang sebanyak 6 Desa sedangkan Jumlah Desa yang dibina di kecamatan bojongsoang sebanyak 6 Desa dan telah berstatus Desa Mandiri sehingga perlu adanya perubahan indikator kinerja yang lebih realistis sehingga dapat diukur serta dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.

   Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah tidak memenuhi target kinerja yang di tetapkan

   namun demikian Kecamatan Bojongsoang masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat
   Indikator Kinerja : Indeks Pelayanan Publik.

   Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 atau Hasil survey kepuasan masyarakat sebanyak 84 orang pengguna layanan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu Semester I adalah 3,27 dengan Nilai IKM sebesar 81,74 dan Semester II adalah 3.28 dengan Nilai IKM sebesar 81,98 dimana mutu pelayanan Semester I dan Semester II adalah B (Baik),

maka capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SKM Tahun 2024 = (Semester I + Semester II)/2

= (3,27 + 3,28) / 2

= 3,28

$$\frac{\text{Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target kinerja}} \times 100\ \% = \frac{3{,}28}{3{,}40} \times 100\ \% = 96{,}47\ \%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah tidak memenuhi target kinerja yang telah di tetapkan, namun demikian Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

1. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai terutama pada infrastruktur penunjang layanan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Aparatur yang masih kurang, terutama yang memahami pada bidang IT

b. Permasalahan terkait Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Fungsi-fungsi koordinatif belum bisa berjalan dengan optimal baik dengan dinas daerah maupun dengan lembaga vertikal.
   2. Masih ditemukan Bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan bangunan.

c. Permasalahan terkait Seksi Pemerintahan
   1. Ketua RT/RW belum semua melaksanakan tertib administrasi.
   2. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
   3. Kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan dari Dinas terkait dalam hal keterlambatan pengurusan permohonan Admiministrasi Kependudukan.

d. Permasalahan terkait Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1. Masih ditemui aparatur Pemerintahan dan Kelompok Masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musrenbang.
   2. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembanguna

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program,

kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Bojongsoang telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD

sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 T-C 31

Review terhadap RKPD Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026

Kabupaten Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bojongsoang	IRB	65.00 Poin				IRB	65.00 Poin	
			Indeks Manajemen Resiko PD	58,5 Poin				Indeks Manajemen Resiko PD	58,5 Poin	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	45,040,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	45,040,000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,060,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,060,000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,530,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,530,000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,060,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,060,000

1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1,530,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1,530,000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3,060,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3,060,000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	10,000,000
1.1.7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	12,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	12,000,000
1.1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	57	Data	10,800,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	10,800,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	Persen	3,818,047,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	Persen	3,818,047,000.00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/bulan	3,815,347,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/bulan	3,815,347,000

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	900,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	900,000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	900,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	900,000
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	900,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	900,000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen	35,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen	35,000,000
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	35,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	35,000,000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	208,113,228	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	208,113,228.00
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000

1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	149,595,228	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	149,595,228
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,000,000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,018,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,018,000
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40,000,000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	432,402,360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	432,402,360.00
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	95,402,360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	95,402,360
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	337,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	337,000,000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	83.0 Persen	35,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	83.0 Persen	35,000,000.00

1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	20,000,000
1.6.2	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5,000,000
1.6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,000,000
	Jumlah 1	Kecamatan Bojongsoang			4,573,602,588	Jumlah 1	Kecamatan Bojongsoang			4,573,602,588
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bojongsoang	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	100.00 Poin	309,000,960	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bojongsoang	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	100.00 Poin	309,000,960.00
			Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	89,60 Persen				Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	89.00 Persen	

2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100.00	Persen	25,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100.00	Persen	25,000,000.00
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	5,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	5,000,000
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	1	Laporan	20,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	1	Laporan	20,000,000
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	Persen	5,000,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	Persen	5,000,000.00
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Laporan	5,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Laporan	5,000,000

2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100	Persen	279,000,960	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100	Persen	279,000,960.00
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	5,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	5,000,000
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	274,000,960	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	274,000,960
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bojongsoang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	Persen	37,500,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bojongsoang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	Persen	37,500,000.00
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojongsoang	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum'	100	Persen	12,500,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojongsoang	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum'	100	Persen	12,500,000.00
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	7,500,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	7,500,000

3.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah aporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat	1 Laporan	5,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah aporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat	1 Laporan	5,000,000
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Persen	25,000,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Persen	25,000,000.00
3.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	25,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	25,000,000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bojongsoang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 Persen	98,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bojongsoang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 Persen	98,000,000.00
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	98,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	98,000,000.00

4.1.1	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	30 orang	50,000,000	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	30 orang	50,000,000
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	50 Orang	30,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	50 Orang	30,000,000
4.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokuimen	18,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokuimen	18,000,000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bojongsoang	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100 Persen	142,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bojongsoang	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100 Persen	142,000,000.00
5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bojongsoang	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 Persen	30,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bojongsoang	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 Persen	30,000,000.00
5.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000

5.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokuimen	10,000,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokuimen	10,000,000
5.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000
5.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Kecamatan Bojongsoang	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 Persen	60,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Kecamatan Bojongsoang	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 Persen	60,000,000.00
5.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000
5.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10,000,000
5.2.3	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10,000,000	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10,000,000

5.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Bojongsoang	Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 Persen	52,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Kecamatan Bojongsoang	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 Persen	52,000,000.00
5.3.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	13,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	13,000,000
5.3.2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	13,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	2 Unit	13,000,000
5.3.3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	13,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	13,000,000
5.3.4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	50 Keluarga	13,000,000	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	13,000,000

	Pengembangan Ekonomi Lainnya		Pengembangan Ekonomi Lainnya							
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bojongsoang	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 Persen	64,440,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bojongsoang	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 Persen	64,440,000.00
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojongsoang	Persentase desa yang dibina	100 Persen	64,440,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojongsoang	Persentase desa yang dibina	100 Persen	64,440,000.00
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	19,440,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	19,440,000
6.1.4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bojongsoang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30,000,000
	Jumlah 2	Kecamatan Bojongsoang			650,940,960	Jumlah 2	Kecamatan Bojongsoang			650,940,960.00
	Jumlah 1+2	Kecamatan Bojongsoang			5,224,543,548	Jumlah 1+2	Kecamatan Bojongsoang			5,224,543,548.00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang –undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan 17 Januari s.d 19 Januari 2025, di 6 Desa se wilayah Kecamatan Bojongsoang. Hasil Musrenbang Desa berupa Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa disampaikan pada Musrenbang di Tingkat Kecamatan, dan setiap desa diwakili oleh 3 (tiga) delegasi yang harus ikut berpartisipasi dalam mengusung Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa masing-masing, agar dapat di usulkan pada Musrenbang di Tingkat Kabupaten.

Pada tanggal 7 Februari 2025 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan Bojongsoang, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bojongsoang dengan dihadiri oleh Tim Musrenbang Kabupaten, Tim Musrenbang Tingkat Kecamatan, Muspika, Kepala Desa dan Aparat Desa, Tim Delegasi Desa, dan wakil dari kelompok masyarakat serta LSM.

Daftar Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, diusung ke Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan diwakili 3 (tiga) orang Delegasi Kecamatan Bojongsoang yang telah terpilih pada pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan.

Hasil kesepakatan dalam pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan, berupa usulan yang disampaikan oleh 6 (enam) desa meliputi 3 (tiga) bidang yakni: Bidang Fisik, berupa perbaikan infrastruktur jalan dan normalisasi/pelebaran anak-anak sungai di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Dinas Disperkimtan berupa usulan Rutilahu; Bidang Ekonomi, terutama sarana prasarana perikanan, pertanian dan peternakan, serta pelatihan di bidang kewirausahaan; dan

Bidang Sosial, berupa pengajuan bantuan untuk bidang kesehatan, pendidikan, serta masalah sosial lainnya.

Adapun Daftar Skala Prioritas Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2025, setelah melalui proses Rasionalisasi di Tingkat Kabupaten, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Adapaun usulan Musrenbang sebagai berikut

1. Usulan Seluruh Desa (DSP) : 281 Usulan
2. Usulan Yang yang dilajutkan : 67 Usulan
3. Usulan Yang ditolak (tidak dilajutkan) : 214 Usulan

Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas teknis untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas teknis atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Tabel 2.4 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegaitan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]
		NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah. Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Yang akan menjadi telaahan dan acuan bagi Kecamatan Bojongsoang yang meupakan bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung, sebagai landasan kebijakannya adalah kebijakan

Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi disesuikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bojongsoang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi dari Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Bojongsoang melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada Visi dan Misi Kabupaten bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang pada ketentuan perundang – undangan sebagai Pelaksanaan tugas Atributif dan Delegatif sebagai kewenangan mandatori dari Bupati Kepada Camat. sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 -Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdiri dari 29 bidang kewenangan dan 24 Sub bidang Kewenangan serta 321 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis Pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan.

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Bojongsoang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan layanan Publik di Kecamatan adalah merupakan hal harus disikapi dan dilaksanbakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Selain Layanan Publik berupa Kegiatan Pelayanan Publik Paten guna pelayanan Administrasi yang dibutuhkan Masyarakat, Kecamatan harus melaksanakan Program dan Kegiatan guna peninmgkatan melalui Peningkatan pelaksaan Program dan Kegiatan serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa agar Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Guna terwujudnya pelayanan yang baik, Kecamatan Bojongsoang dengan Visi Pelayanan : Terwujudnya Pelayanan yang Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat, dan Santun**,** (Motto Bojongsoang Mamprang) ditunjang dengan Misi Pelayanan

1. Mewudkan Pelayanan Cepat (sesuai dengan SOP)
2. Meningkatkan Pelayanan yang efektif
3. Meningkatkan Pelayanan yang Responsif
4. Meningkatkan Pelayanan yang Dinamis
5. Meningkatnya Pelayanan yang Akurat
6. Mewujudkan Aparatur yang santun dalam melayani

Dengan Tujuan tersebut Kecamatan Bojongsoang sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat Kecamatan diwujudkan dengan Akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang diwujudkan adanya komitmen seluruh jajaran di Kecamatan untuk berkinerja dengan baik dengan Perjanjian Kinerja, dan untuk m,engevaluasi terhadap kinerja aparatur tersebut perlu dilakuan pengukuran Kinerja dengan acuan target capaian Kinerja sebagaimana Perencanaan dalam Renstra dan Renja.

Tata kelola pemerintahan sebagaimana Tujuannya harus dapat dilaporkan Kinerjanya melalui LKIP yang harus sisusun setiap tahun dengan data yang bersumber dari hasil kinerja masing – masing unit kerja yang ada di kecamatan.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Renja Kecamatan Bojongsoang adalah "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan" yang sejalan dengan Visi dan Misi kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima. Indikator Kinerja: Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan. Dengan meningkatnya nilai IKM, berarti pelayanan yang diberikan semakin memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Secara singkat, sasaran ini menekankan perbaikan mutu layanan agar masyarakat merasa lebih puas, yang dibuktikan melalui peningkatan skor IKM.

Untuk mencapai Sasaran tersebut Camat Bojongsoang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan Monitoring dan Evaluasi internal tersebut diharapkan Kinerja Kecamatan Bojongsoang dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan gunapencapaian Target Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang dalam Penyerapannyadapat secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya Selain Monitoring dan Evaluasi Internal, Camat Bojongsoang telah melakukan upayapenegakan Disiplin aparatur dan terus meningkatkan koordinasi guna membangunan soliditas Kinerja Pembangunan di kecamatan Bojongsoang.

Tujuan, Sasaran dan Indilator Kinerja Utama Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026 dapat kita lihat pada table di bawah :

Table Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Kecamatan Bojongsoang

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Bojongsoang	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggarea Pelayanan Publik Kecamatan Bojongsoang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran Persentase dokumen pelaporan kinerja. yang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

1.1.3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			disusun sesuai ketentuan Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.1.4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
1.1.6	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

1.1.7			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
1.1.8			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
1.2	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan	Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan		
1.2.1	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

1.2.2	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.3	Tersusunnya laporan keuangan periodik SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyuaunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1.2.4	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.3	Terlayananinya ASN pada layanan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan		
1.3.1	Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

1.4	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Jumlah Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP sesuai ketentuan	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		
1.4.1	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.4.2	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	
1.4.3	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1.4.4	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1.4.5	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan sesuai kebutuhan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

1.4.6	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
1.4.7	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.5.1	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.5.2	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemenuhuan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		

1.6.1	Terpenuhinya ke Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
1.6.2	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Meubel	Terlaksananya Pemeliharaan Meubel	Pemeliharaan Meubel			Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan		Jumlah Meubel yang Dipelihara	
1.6.3	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.6.4	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat					

2.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan		
2.1.1	Terlaksananya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasi dan terlaporkannya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
2.1.2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	

2.2	Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
2.2.1	Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2.3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
2.3.1	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha sesuai ketentuan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	

2.3.2	Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat	Terlaksananya yrysan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bojongsoang	Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat					
3.1	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Tercipatanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihakpihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum		
3.1.1	Tercipatanya sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

3.1.2	Tercipatanya harmonisasi dengan tokohtokoh masyarakat	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Jumlah aporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat	
3.2	Tegaknya Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan	Tercipatanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundangundangan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
3.2.1	Terciptanya sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bojongsoang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat					
4.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah terhadap Jumlah Penugasan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Jumlah Penugasan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
4.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional					Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	
4.1.2	Terciptanya Kerukunan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di Lingkungan Kecamatan	Terbinanya masyarakat dalam menciptakan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	

4.1.3	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat					
5.1	Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		
5.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
5.1.2	Terciptanya harmonisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

5.1.3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.2	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa		
5.2.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	
5.2.2	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Terlaksana dan terlaporaknnya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

5.2.3	Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
5.3	Tersedianya Dokumen Keluarga yang Terfasilitasi	Tersusunya Dokumen Keluarga yang Terfasilitasi	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun	Persentase Keluarga yang Terfasilitasi	Persentase Keluarga yang Terfasilitasi		
5.3.1	Tersedianya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Tersusunya Dokumen Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
5.3.2	Tersedianya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

5.3.3	Tersedianya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tersusunya Dokumen Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
5.3.4	Tersedianya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Tersusunya Dokumen Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bojongsoang	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat					

6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan		
6.1.1	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	
6.1.2	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.3	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6.1.4	Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam Pelaksaaan Kebijakan dan Program senantiasa memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026

Guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Bojongsoang

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan program secara efektif dan efesien

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Bojongsoang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Bojongsoang pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stap harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar

Tabel 3.3 T-C.33

Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kecamatan Bojongsoang

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7	1	0	0	0	KECAMATAN									
7	1	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks manajemen Resiko Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	56.50	Poin	4,573,602,588.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	56.50	Poin	4,288,870,000
						Indeks Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	61.00	Persen			61.00	Persen	
						Nilai AKIP	Kecamatan Bojongsoang	74.00	Poin			74.00	Poin	
7	1	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	45,040,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	11,175,000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu	Kecamatan Bojongsoang	2	Dokumen	3,060,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2	Dokumen	1,999,000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	1,530,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	794,000

7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	3,060,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	794,000
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Diselesaikan Tepat Waktu	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	1,530,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	794,000
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlaph DPPA SKPD Diselesaikan Tepat Waktu	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	3,060,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	794,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	5,000,000
7	1	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	12,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	500,000
7	1	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	1	Data	10,800,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Data	500,000
7	1	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	3,818,047,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	3,818,047,000

7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bojongsoang	18	Orang/bulan	3,815,347,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	18	Orang/bulan	3,815,347,000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	900,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	900,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	900,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	900,000
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Bojongsoang	2	Dokumen	900,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2	Dokumen	900,000
7	1	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	35,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	5,000,000
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bojongsoang	30	Orang	35,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30	Orang	5,000,000
7	1	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	208,113,228.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	96,248,000

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bojongsoang	1	Paket	2,500,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Paket	2,500,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Bojongsoang	1	Paket	149,595,228	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Paket	62,730,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Bojongsoang	1	Paket	3,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Paket	3,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bojongsoang	1	Paket	3,018,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Paket	3,018,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	-
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	10,000,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	40,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	15,000,000
7	1	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	432,402,360.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-	100	Persen	323,400,000

										DANA ALOKASI UMUM			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	95,402,360	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	42,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	337,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	281,400,000
7	1	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kecamatan Bojongsoang	83	Persen	35,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	85.00	Persen	35,000,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Bojongsoang	7	Unit	20,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7	Unit	20,000,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Bojongsoang	3	Unit	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3	Unit	5,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bojongsoang	2	Unit	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2	Unit	10,000,000
					Jumlah 1					4,573,602,588.00				4,288,870,000

7	1	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kecamatan Bojongsoang	85	Poin	309,000,960.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	88	Poin	106,375,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	10,000,000
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	5,000,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	20,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	5,000,000
7	1	2	2.03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	2,500,000
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	2,500,000
7	1	2	2.04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	279,000,960.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	93,875,000

7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	5,000,000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	274,000,960	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	88,875,000
7	1	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	37,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	15,000,000
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum'	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	12,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	10,000,000
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	2	Laporan	7,500,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2	Laporan	5,000,000
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah aporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	5,000,000
7	1	4	2.02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	5,000,000

7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	5,000,000
7	1	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	98,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	38,000,000
7	1	5	2.01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	98,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	38,000,000
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Kecamatan Bojongsoang	30	orang	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30	orang	5,000,000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Kecamatan Bojongsoang	50	Orang	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50	Orang	15,000,000
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokuimen	18,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokuimen	18,000,000

7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	142,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	50,000,000
7	1	3	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	30,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	25,000,000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bojongsoang	2	Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2	Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokuimen	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokuimen	10,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	7,500,000
7	1	3	2.03	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	60,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	15,000,000

7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Bojongsoang	2	Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2	Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	5,000,000
7	1	3	2.03	5	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Bojongsoang	1	Laporan	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Laporan	5,000,000
7	1	3	2.06	0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	52,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	10,000,000
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Bojongsoang	50	Keluarga	13,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50	Keluarga	2,500,000
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bojongsoang	50	Keluarga	13,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50	Keluarga	2,500,000
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Bojongsoang	50	Keluarga	13,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50	Keluarga	2,500,000

7	1	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Bojongsoang	50	Keluarga	13,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50	Keluarga	2,500,000
7	1	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	64,440,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	53,000,000
7	1	6	2.01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	Kecamatan Bojongsoang	100	Persen	64,440,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100	Persen	53,000,000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	15,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	15,000,000
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	19,440,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	8,000,000
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bojongsoang	1	Dokumen	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1	Dokumen	30,000,000
					Jumlah 2					650,940,960.00				262,375,000
					Jumlah Total (1+2)					5,224,543,548.00				4,551,245,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BOJONGSOANG

4.1. Rencana Kerja Pencapaian Sasaran

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025 berisi program,kegiatan, dan Sub Kegiatan. baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuandan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

4.2. Rencana Pendanaan Perangkat daerah

Setelah menentukan program yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu strategis, maka dirumuskan perencanaan pendanaan untuk melaksanakan program-program yang dipilih. Total program, kegiatan, subkegiatan beserta besaran anggaran yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bojongsoang

Tahun 2025

No	Urusan/Bidang/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
[1]	[2]	[3]	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	4,573,602,588	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,040,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,060,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,1,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,530,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,1,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3,060,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,1,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,530,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,1,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,060,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

1,1,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,1,7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,1,8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10,800,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,818,047,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,815,347,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,2,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	900,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,2,3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	900,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,2,4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	900,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,3,1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208,113,228	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,4,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149,595,228.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,4,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,4,4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,018,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,4,5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,4,6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,4,7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432,402,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,5,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95,402,360	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,5,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,6,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,6,3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1,6,4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Jumlah 1		4,573,602,588	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	309,000,960	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,1,1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,1,2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan	20,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,2,1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	279,000,960	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,3,1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,3,2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	274,000,960	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37,500,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

3,1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,500,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3,1,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7,500,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3,1,2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3,2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3,2,1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	98,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4,1,1	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4,1,2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4,1,3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	142,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,1,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,1,2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,1,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	60,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,2,1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,2,2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,2,3	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	10,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

5,3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,3,1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	13,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,3,2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,3,3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5,3,4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	13,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	64,440,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
6,1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64,440,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
6,1,1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
6,1,2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19,440,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
6,1,4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
Jumlah 2		650,940,960	
Jumlah Total (1+2)		5,224,543,548	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bandung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis yang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bojongsoang itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bojongsoang dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Bojongsoang 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Bandung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bojongsoang tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Bojongsoang mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 5.224.543.548,00 (Empat milyard enam ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) program antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil

sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan :

1. seluruh pejabat struktural di Kecamatan agar mengawal pelaksanaan renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah- kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindaklanjut dalam merespon di masa yang akan datang melalui prioritas kegiatan adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

CAMAT BOJONGSOANG

ttd

KANKAN TAUFIK BARNAWAN

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA